

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG MASALAH

Pasca kepemimpinan mantan presiden Suharto, praktik kehidupan pers memasuki ruang politik baru yang liberal. Pers secara mengejutkan mengalami euforia kebebasan setelah lama terbelenggu oleh kooptasi kekuasaan. Beberapa media baru dalam persaingan untuk merebut pembaca bahkan berani melansir berita-berita secara transparan dengan *headline-headline* bombastis.

Etos dan kebebasan baru yang dimiliki pers, dimungkinkan berpengaruh terhadap ketentuan alternatif peran dan kiprah pers dalam ruang gerak yang baru. Ruang gerak baru tersebut, adalah posisi pers sebagai media diskusi publik (arena sosial) sekaligus arena perang simbolik antara pihak-pihak yang berkepentingan dengan pokok persoalan wacana.<sup>1</sup>

Fakta-fakta dari suatu wacana peristiwa tidak seluruhnya dapat diterbitkan, tetapi dipilih melalui seleksi tertentu. Maka berita-berita yang ada di media merupakan hasil seleksi fakta-fakta tentang suatu peristiwa. Proses pengolahan fakta sampai menjadi berita dikenal dengan istilah jurnalisme. Dalam melakukan semua kegiatan jurnalisme, media melakukan framing dalam melihat realitas.

Menulis berita dalam media cetak adalah upaya untuk menceritakan konseptualisasi sebuah peristiwa. Rangkaian dalam mengkonstruksi realitas

---

<sup>1</sup> Soerjadi, H.A. & Oursaini, Hasan. "Tanya: Wacana dalam Citar Media (Analisis Berita, Dan

dimulai dari pengumpulan informasi dengan pengamatan, pencatatan, melakukan wawancara, untuk kemudian dituangkan ke dalam sebuah reportase.

Proses konstruksi realitas memungkinkan semua pihak untuk menyampaikan pesan dan nilai yang dianggap layak menurut versi kebenaran masing-masing kelompok. Media dalam posisi ini menjadi arena diskusi publik dimana setiap kelompok sosial saling bertarung dan menyajikan perspektif untuk memberikan pemaknaan terhadap suatu persoalan dengan harapan agar pandangannya lebih diterima oleh publik.

Dalam konteks inilah media berupaya menggiring khalayak untuk melihat dan mendefinisikan suatu realitas dalam bingkai serta sudut pandang tertentu. Hal ini dilakukan dengan penggunaan struktur bahasa simbolik atau retorika dengan konotasi tertentu, atau bahkan dengan sistem logika tertentu. Logika ini pada akhirnya akan melahirkan tindakan pembenaran diri sendiri dan menyalahkan pihak lain.

Penelitian ini akan menggunakan pisau analisis framing untuk mendeteksi *frame* pemberitaan media Bangka Pos dan Kompas terhadap konflik antara penambang timah dengan pemerintah mengenai kerusakan lingkungan hidup akibat adanya penambangan timah di pulau Bangka.

Pulau Bangka dikenal kaya akan Sumber Daya Alam (SDA) yang berupa timah. Hampir diseluruh bagian tanah kepulauan Bangka mengandung banyak timah. Di Pulau Bangka sendiri sudah ada beberapa perusahaan yang mengelola timah dan kemudian untuk diekspor ke negara luar. Hasil ekspor timah tersebut merupakan *input* yang dimanfaatkan untuk kemajuan Pulau Bangka itu sendiri

Peluang inilah yang membuat para oknum ingin memanfaatkan SDA yang berupa timah ini menjadi keuntungan besar. Dengan menggunakan modal yang tidak sedikit, para oknum ini menggali lahan-lahan kosong yang setelah dideteksi ternyata terdapat timah. Keuntungan yang diraup pun hasilnya sangat memuaskan bagi para penambang timah ini, terutama sekali untuk memajukan perekonomian keluarga.

Lama kelamaan dari satu penambang timah, tumbuh penambang timah lainnya yang juga ingin memanfaatkan SDA timah ini. Karena bukan hal yang sulit untuk mencari lokasi yang akan dijadikan lahan timah. Contohnya di daerah Bangka bagian selatan, tampaknya mereka sangat kemudahan untuk menemukan lahan timah. Cukup dengan menyediakan alat berat berupa mobil pengeruk, mereka sudah bisa menggali lahan di halaman pekarangan rumah mereka sendiri yang ternyata terdapat timah. Dengan kemudahan seperti ini, sulit untuk menghentikan aktivitas mereka sebagai penambang timah. Lama kelamaan, tanah Pulau Bangka yang semula dalam keadaan baik/rata kini menjadi rusak akibat maraknya penggalian lahan. Tidak hanya itu saja, masyarakat sekitar pun terkena imbas akibat pengaruh yang timbul dari penambangan timah tersebut. Misalnya, terjadi kelangkaan air bersih (karena terkena limbah tambang timah) bagi penduduk yang tinggal disekitar lokasi penambangan timah, kemudian rusaknya kawasan hutan lindung yang juga dijadikan aktivitas penggalian lahan timah.

Melihat persoalan yang semakin mencuat ini, timbul langkah dari pemerintahan setempat yang berusaha menghimbau kepada para penambang

masyarakat yang terus merasakan ketidaknyamanan akibat dampak buruk dari penambangan timah ini.

Untuk mengambil langkah yang lebih tegas, pemerintah Bangka telah menetapkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2001 yang mengatur tentang pertambangan umum. Kendati perda pertambangan itu sudah diberlakukan, namun hingga kini masalah penegakan hukum terhadap para pemilik tambang masih belum berjalan dengan baik. Hal ini disebabkan pemerintah kabupaten Bangka tidak dapat memaksakan warganya untuk berhenti bekerja di tambang tanpa menyediakan lapangan kerja alternatif.

Analisis dilakukan dengan 2 media, yakni Surat kabar Bangka Pos (sebagai media lokal Bangka) dan Surat kabar Kompas. Pemilihan dua media ini diharapkan dapat memberikan pemahaman melalui frame masing-masing.

Harian Bangka Pos memaknai peristiwa ini sebagai masalah yang kontroversial jika dilihat dari sudut Perda Pertambangan. Dalam teks berita Bangka Pos, mewawancarai langsung Tim Pengumpulan Data dari Proyek Indonesia Rapid Decentralization Appraisal (IRDA) III, yang menilai Peraturan Daerah Propinsi Bangka Nomor 6 Tahun 2001 yang mengatur tentang pertambangan umum di Propinsi Bangka. Peraturan tersebut dipandang sebagai aksi/tindakan dari pemerintah untuk melarang tambang timah yang dilakukan tidak sesuai dengan peraturan. Terbukti ketika masih beroperasi salah satu pemilik tambang timah milik warga Sungai Liat yang masih juga melakukan kegiatan tambang timahnya di tanah perkuburan milik Yayasan Sentosa Sungai

Liat. Pada edisi 3 Oktober 2002, Bangka Pos memuatkan berita mengenai

anjuran dari pemerintah supaya usaha penambangan timah tersebut diminta untuk segera ditutup. Proses pemantauan lokasi tetap diadakan oleh pihak yang berwenang. Menjamurnya aktivitas penambang timah dalam usaha penggalian lahan timah yang dilakukan tanpa izin ini ditindaklanjuti oleh pemerintah. Dalam menanggapi masalah ini masyarakat Pulau Bangka mengharapkan sesuatu tindakan yang pasti dari pemerintah supaya memberikan sanksi bagi yang memiliki tambang timah tanpa izin, berdasarkan UU Pertambangan yang berlaku. Bagaimana jalan keluar yang terbaik supaya Pulau Bangka tidak terus-menerus menerima dampak buruk yang mengakibatkan bumi Bangka menjadi rusak.

Dalam bingkai Kompas, cenderung memfokuskan pemberitaan pada aktivitas penambang timah yang telah menggantungkan hidupnya pada usaha penambangan timah tersebut. Media Kompas edisi 25 November 2003 menurunkan berita yang berjudul “Bangka Belitung Melepaskan Ketergantungan dari Timah”. Judul ini mengungkapkan bagaimana tergantungnya sebagian masyarakat Bangka selama ini atas kekayaan timah yang ada di bumi Bangka Belitung. Kompas terkesan mengungkapkan sulitnya melepaskan Bangka Belitung dari aktivitas menambang timah. Karena banyak warga masyarakat yang bekerja mencari pasir timah dengan membuka areal pertambangan sendiri. Namun, Kompas tidak memberikan penilaian “memihak” atau pun “kontra”, Kompas tidak memberikan *statement* bahwa penambangan timah itu diperbolehkan. Kompas hanya memandang Bangka akan sulit dipisahkan dari pemanfaatan SDA timah. Pemikiran ini berdasarkan dari pengamatan langsung oleh Kompas ke lokasi Pulau Bangka yang melihat kebanyakan warga masyarakat

kecil yang mau bekerja sebagai buruh. Banyak pula masyarakat Bangka yang membuka penambangan timah dalam skala besar.

Media massa sebagai wadah informasi aktual tidak hanya sekadar mengamati dan melansir realitas berita ke hadapan publik pembaca, melainkan juga menyertakan sejumlah opini dari berbagai pihak terhadap penilaian atas fakta berita tersebut. Keberpihakan menjadi etis jika media memberikan kesempatan yang sama, seimbang, dan setara kepada pihak yang terlibat dalam suatu wacana berita untuk menyampaikan pandangan. Misalnya dengan menghindari pandangan emosional dalam melihat peristiwa, melihat peristiwa dari beberapa sisi yang berbeda (objektif), memberikan prinsip keseimbangan dan keadilan<sup>2</sup>. Dengan demikian, media tetap menjadi arena terbuka bagi terciptanya diskusi publik, tempat bagi masing-masing kelompok saling bertarung, menyajikan perspektif, dan memberikan pemaknaan terhadap suatu persoalan atau realitas.

Dalam membentuk realitas berita konflik antara penambang timah dengan pemerintah, surat kabar Bangka Pos menjadi forum bertemunya pihak-pihak dengan kepentingan, latar belakang, serta sudut pandang yang berbeda. Masing-masing pihak berusaha menguatkan/membenarkan argumentasinya untuk memberikan penjelasan terhadap persoalan tersebut agar argumennya dapat diterima oleh khalayak. Dalam konteks inilah pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan tersebut menggiring khalayak untuk melihat dan mendefinisikan suatu realitas dalam bingkai serta sudut pandang tertentu. Hal ini dilakukan dengan penggunaan struktur bahasa simbolik/retorika dengan konotasi tertentu,

---

<sup>2</sup> Saripudin H.A&Qusyaini Hasan, "Tomi Winata dalam Citra Media(Analisis Berita Pers Indonesia)", jAri, Jakarta, 2003, h.22.



## **B. PERUMUSAN MASALAH**

Berangkat dari segala ilustrasi pada latar belakang masalah, penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

“Bagaimana Harian Bangka Pos dan Kompas mem-framing konflik antara penambang timah dengan pemerintah mengenai kerusakan lingkungan hidup akibat adanya penambangan timah di Pulau Bangka, pada edisi Oktober 2003-Desember 2003?”

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

1. Untuk mendeteksi frame pemberitaan Bangka Pos dan Kompas pada edisi Oktober 2003-Desember 2003 terhadap berita tentang konflik antara penambang timah dengan pemerintah mengenai kerusakan lingkungan hidup akibat adanya penambangan timah di Pulau Bangka.
2. Untuk mengetahui teknik framing yang dilakukan harian Bangka Pos dan Kompas

## **D. MANFAAT PENELITIAN**

1. Dapat mengetahui proses framing yang terjadi pada media Bangka Pos dan Kompas.
2. Dapat mengetahui teknik framing media Bangka Pos dan Kompas



## **E. PENDEKATAN PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan konstruksionis, karena dengan menggunakan pendekatan ini peneliti akan melihat bagaimana komunikator yaitu harian Bangka Pos dan Kompas menyusun atau mengkonstruksi fakta-fakta tentang konflik antara penambang timah dengan pemerintah mengenai kerusakan lingkungan hidup. Bagaimana gambaran yang ingin ditampilkan harian Bangka Pos dan Kompas kepada publik tentang permasalahan tersebut.

Pendekatan konstruksionis mempunyai 2 karakteristik penting<sup>5</sup>. *Pertama*, pendekatan konstruksionis menekankan pada politik pemaknaan dan proses bagaimana seseorang membuat gambaran tentang realitas. Makna adalah suatu proses aktif yang ditafsirkan seseorang dalam suatu pesan. *Kedua*, pendekatan konstruksionis memandang kegiatan komunikasi sebagai proses yang dinamis, yang menampilkan makna apa adanya. Komunikator dengan realitas yang ada akan menampilkan fakta tertentu kepada komunikan, memberikan pemaknaan tersendiri terhadap suatu peristiwa dalam konteks pengalaman dan pengetahuannya sendiri.

## **F. KERANGKA TEORI**

Politik Lingkungan adalah interaksi kekuasaan yang mempengaruhi proses pembuatan keputusan mengenai pemanfaatan Sumber Daya Alam tertentu, termasuk perubahan ekosistem tertentu yang bisa berakibat buruk bagi

---

<sup>5</sup> Erlangga, "Analisis Framing Konstruksi Ideologi dan Politik Media" LKIS, Yogyakarta, 2002

kelompok masyarakat tertentu yang kehidupannya tergantung pada SDA tersebut serta pelestarian ekosistemnya<sup>6</sup>.

Dalam hubungannya dengan definisi tersebut, terdapat perbedaan antara 2 *style* politik lingkungan<sup>7</sup>, yaitu "*grass-roots politics*" (politik akar rumput) dan "*up-rooted politics*". Politik akar rumput adalah dimana proses pembuatan keputusan mengenai pemanfaatan SDA tertentu dan atau perubahan ekosistem tertentu masih melibatkan orang-orang yang kehidupannya masih banyak tergantung pada SDA dan atau ekosistem tersebut. Sedangkan pada spektrum yang ekstrem, kita akan menemukan situasi dimana proses pembuatan keputusan mengenai pemanfaatan SDA dan atau perubahan ekosistem dijauhkan dari atau tidak melibatkan orang-orang yang secara langsung paling mungkin terkena dampak oleh keputusan tersebut.

Namun ketika peralihan masa ke Orde Baru, aturan rencana pembangunan kota dan daerah menjadi suatu permasalahan yang pelik. Dimana UU gangguan lingkungan hidup biasanya hanya diterapkan untuk melindungi kepentingan warga kota kelas menengah keatas. Sedangkan untuk di kawasan pinggiran kota/pedesaan, yang membuat keputusan adalah balai kota, sehingga tidak ada kekuatan hukum apabila terjadi suatu kesalahan pemanfaatan SDA di kawasan pinggiran kota.

Karena menggunakan pendekatan konstruksionis yang bertujuan untuk mrngkonstruksi realitas sosial, maka teori yang relevan digunakan adalah teori

---

<sup>6</sup> Definisi sementara tentang politik lingkungan yang dikemukakan oleh Stuart S.Nagel dan Arn H.Pearson serta Frederick H.Buttel dalam *Environmental Politics; An Annotated Bibliography*.

<sup>7</sup> *Grass-roots* James Adair dan "Political Ecology: A New Paradigm" *Environmental Politics*

framing. Karena dengan menggunakan teori framing, akan dilihat bagaimana media Bangka Pos dan Kompas sebagai komunikator merekonstruksi fakta-fakta tentang suatu peristiwa, dalam hal ini adalah merekonstruksi konflik antara penambang timah dengan pemerintah mengenai kerusakan lingkungan hidup akibat adanya penambangan timah di Pulau Bangka. Bagaimana media memberikan pemaknaan tentang realitas sosial melalui berita-beritanya.

Maka teori framing sesuai dengan pendekatan konstruksionis, di mana media menyusun fakta-fakta tentang suatu persoalan kepada publik. Teori tentang framing ini berkaitan dengan institusi pers sebagai institusi sosial dalam hal ini adalah surat kabar harian sebagai media pers yang merupakan suatu institusi sosial yang melayani kepentingan masyarakat melalui sajian-sajian berita dalam surat kabar dengan tujuan untuk mendapatkan kepercayaan dan kepuasan dari khalayaknya. Pers sebagai institusi sosial, di mana pers mempunyai fungsi politik, fungsi ekonomi, atau fungsi sosial kultural bagi masyarakat.

Dalam penelitian ini, penulis akan meneliti aspek dari media yaitu pada pesan di dalam media yang berupa berita. Berita adalah laporan tentang sebuah peristiwa. Berita juga dipahami sebagai laporan / pemberitahuan mengenai terjadinya peristiwa / keadaan yang bersifat umum yang disampaikan oleh wartawan dalam media massa<sup>8</sup>. Berita-berita yang ada di media akan melalui proses penyeleksian fakta-fakta tentang suatu persoalan. Fakta-fakta yang ada itu tidak seluruhnya dapat diberitakan, tetapi dipilih melalui seleksi tertentu. Fakta-fakta yang ada disesuaikan dengan kriteria agenda yang diliput dan kemudian

<sup>8</sup> Kurniawan Jusodhi "Enciklopedia Pers Indonesia" PT Gramedia, Jakarta, 1991

diolah melalui suatu proses pengolahan fakta-fakta sampai menjadi berita disiarkan atau lebih dikenal dengan jurnanisme. Definisi jurnanisme menurut Richard Weiner adalah keseluruhan proses pengumpulan fakta, penulisan, penyuntingan dan penyiaran berita<sup>9</sup>.

Menurut Tunstall, surat kabar merupakan pola dasar dan juga prototip semua media massa modern dan dapat dipastikan bahwa unsur penting surat kabar adalah berita<sup>10</sup>. Karena berita adalah satu dari sedikit kontribusi media yang paling orisinal. Berita menyediakan komponen yang menonjol/membedakan sesuatu yang disebut surat kabar dari media lainnya, memperoleh perlindungannya sendiri dari teori pers bebas/sanksi dari teori otoriter dan berdasarkan konvensi memungkinkannya mengungkapkan pendapat atas nama publik. Bahkan, harapan tertinggi tentang “kebenaran realitas” dilekatkan pada berita/informasi.

Penulisan berita bukanlah proses privat apalagi individual, mengingat berita adalah produk media yang tidak lepas dari proses kompleks organisasi media yang idealnya. Seperti tercantum pada semua teori pers normatif, mengutamakan kepentingan khalayak terlebih dahulu baru mengutamakan kepentingan lainnya. Pada kenyataannya, di dalam industri media bertarung berbagai kepentingan. Gerbner menggambarkan para komunikator massa dalam keadaan tertekan. Tekanan itu berasal dari pelbagai kekuatan luar, termasuk dari klien (misalnya para pemasang iklan), penguasa (khususnya penguasa hukum dan publik), pakar, institusi lain dan khalayak.

## F.1. Komunikasi Sebagai Proses Produksi Makna

Analisis framing adalah salah satu metode analisis teks yang berada dalam kategori penelitian konstruksionis. Paradigma ini memandang realitas kehidupan sosial bukanlah realitas yang natural, tetapi hasil dari konstruksi. Karenanya, konsentrasi analisis pada paradigma konstruksionis adalah menemukan bagaimana peristiwa atau realitas tersebut dikonstruksi, dengan cara apa konstruksi itu dibentuk. Dalam studi komunikasi, paradigma konstruksionis ini seringkali disebut sebagai paradigma produksi dan pertukaran makna<sup>11</sup>. Ia sering dilawankan dengan paradigma positivis (paradigma transmisi). Paradigma positivis melihat komunikasi sebagai bentuk pengiriman pesan. Komunikasi disini dilihat sebagai suatu proses bagaimana pesan terkirim dari pengirim ke penerima dan proses yang terjadi dalam pengiriman tersebut. Proses tersebut dilihat secara linier dari pengirim ke penerima melewati saluran. Model transmisi memetakan / melihat komunikasi sebagai sebuah jalan, dan mengasumsikan bahwa informasi, pengertian, dan pikiran dikirimkan<sup>12</sup>. Ada perbedaan mendasar antara paradigma yang melihat komunikasi sebagai transmisi dan paradigma yang melihat komunikasi sebagai produksi pertukaran makna.<sup>13</sup> *Pertama*, dari sudut definisi mengenai komunikasi sebagai interaksi sosial. Pendekatan positivis / transmisi melihat komunikasi sebagai suatu proses di mana seseorang mempengaruhi perilaku atau pikiran orang lain. Jika pengaruh itu berbeda dari apa yang dimaksudkan komunikator maka dapat dikatakan terjadi kegagalan komunikasi.

---

<sup>11</sup> John Fiske, *Introduction to Communication Studies*, Second Edition, London and New York: Routledge, 1990, h.2-4.

<sup>12</sup> Glen Lewis and Christina Slade, *Critical Communication*, Sydney, 1994, h.8-9.

<sup>13</sup> John Fiske, "Introduction to Communication Studies", London and New York: Routledge, 1990, h.2-4.

Dalam pandangan positivis, pesan adalah apa yang pengirim lemparkan kepada khalayak, apa pun artinya. Pendekatan konstruksionis sebaliknya, memusatkan perhatian pada bagaimana pesan atau teks, hubungan dengan khalayak dalam memproduksi makna yang berarti menitikberatkan pada peranan teks dalam kebudayaan. Tidak adanya saling pengertian di antara partisipan komunikasi, tidak dipandang sebagai kegagalan komunikasi. Pendekatan konstruksionis melihat dari sisi lain, pesan adalah suatu konstruksi tanda melalui hubungan dalam produksi dan pertukaran makna. Penekanan terletak pada teks dan bagaimana ia dibaca. Dan pembacaan itu adalah suatu proses dan penemuan makna yang terjadi ketika pembaca berinteraksi dan berhubungan dengan teks. Pemaknaan memberikan tempat kepada pembaca aspek pengalaman budaya untuk melahirkan suatu kode dan tanda yang terwujud dalam teks. Pembaca dengan pengalaman sosial berbeda boleh jadi menemukan makna berbeda dalam teks yang sama. Di sini tidak dikatakan sebagai kegagalan komunikasi. Pesan, dengan demikian, tidaklah sesuatu yang dikirimkan dari A ke B, tetapi sebagai bagian dari struktur hubungan di antara realitas luar dan pencipta / pembaca. Paradigma transmisi / positivis melihat interaksi sosial sebagai proses dimana satu orang berhubungan dengan orang lain, memberikan stimulus dan mempengaruhi, baik sikap maupun perilaku. Komunikasi disini dilihat sebagai suatu penyebaran pesan, di mana seseorang akan mempengaruhi orang lain. Sebaliknya, paradigma konstruksionis melihat komunikasi bukan sebagai penyebaran pesan dan gagasan, tetapi proses pembentukan individu sebagai anggota dari kebudayaan atau

*Kedua*, perbedaan dalam hal definisi tentang pesan itu sendiri. Paradigma transmisi (proses) melihat pesan sebagai apa yang dikirimkan atau disebarkan oleh seseorang dalam suatu proses komunikasi. Penerima bisa sadar atau tidak sadar, mengerti atau tidak mengerti, tetapi pesan adalah apa yang dikirimkan oleh seseorang dalam proses komunikasi tersebut. Dalam pandangan konstruksionis, pesan adalah konstruksi, melalui interaksi dengan penerima (*receiver*). Pesan di sini bukan apa yang dikirimkan, tetapi apa yang dikonstruksi, dan apa yang dibaca. Makna bukan sesuatu yang fisik dan statis seperti pandangan transmisi, tetapi justru adalah produk konstruksi dan interaksi antara pengirim dan penerima. Membaca sendiri adalah suatu proses menemukan makna yang terjadi ketika pembaca berinteraksi (negosiasi) dengan teks. Negosiasi itu menempatkan pembaca bersama-sama dengan aspek pengalaman budaya dan nilai-nilai yang tertanam untuk mengkode dan menandakan pesan. Sangat mungkin terjadi pesan yang sama bisa dimaknai secara berbeda. Pesan di sini bukan apa yang dikatakan oleh pengirim, bukan bahasa yang dipakai, juga bukan laporan berita, tetapi bagaimana pemaknaan pihak-pihak yang terlibat dalam komunikasi. Khalayak yang mempunyai pengalaman sosial dan perbedaan kultur akan menemukan makna yang berbeda dalam teks yang sama. Dan di sini tidak dianggap sebagai kegagalan dalam berkomunikasi. Pesan disini bukan sesuatu yang dikirimkan dari A ke B, tetapi sebuah elemen dalam hubungan struktur yang mana semua elemen tersebut memasukkan realitas eksternal dan produser / pembaca. Produksi dan pembacaan teks karenanya dapat dilihat identik, kalau tidak disebut sama, proses yang menempatkan dalam hubungan struktural

Dalam paradigma transmisi memang ada proses timbal balik, penafsiran ulang (seperti *feed-back*) bagaimana penerima sebetulnya aktif mengirimkan pesan ulang kepada pengirim. Meskipun demikian, asumsinya berbeda dari pandangan produksi dan pertukaran makna. Dalam paradigma transmisi, seseorang akan mengkode ulang pesan yang dimaksudkan oleh pengirim untuk kemudian dikirimkan kembali kepada pengirim. Di sini tetap saja tujuan utamanya adalah adanya pengertian bersama antara pengirim dan penerima. Pengirim dan penerima tidak digambarkan mempunyai pandangan, nilai, dan ideologi yang berbeda yang membuat bisa saja mereka menafsirkan secara berbeda suatu teks atau pesan yang saling dipertukarkan. Model transmisi mengasumsikan bahwa makna adalah produk individual, *independent* dari konteks sosial / lingkungan tertentu dan seseorang dapat memproduksi apa yang ia inginkan. Dalam pandangan transmisi, makna dari suatu pesan bukan produk individual, tetapi ia juga bebas dari saluran komunikasi, atau penerima. Ketika seseorang memproduksi pesan, ia tidak tergantung kepada partisipannya. Sebaliknya, dalam pandangan produksi dan pertukaran makna, makna itu justru bukan produk individual, ia adalah kegiatan sosial, dan ditempatkan dalam konteks tertentu. Kita, baik sebagai pengirim maupun sebagai penerima, tidak bisa secara total dan independen membentuk makna secara bebas. Karena makna adalah produk dari kelompok sosial yang menerima dan *share* bersama nilai-nilai yang ada dalam komunitas. Partisipan komunikasi juga tergantung pada saluran komunikasi, saluran ini sedikit banyak menentukan makna yang nyata dan ingin ditampilkan<sup>14</sup>.

---

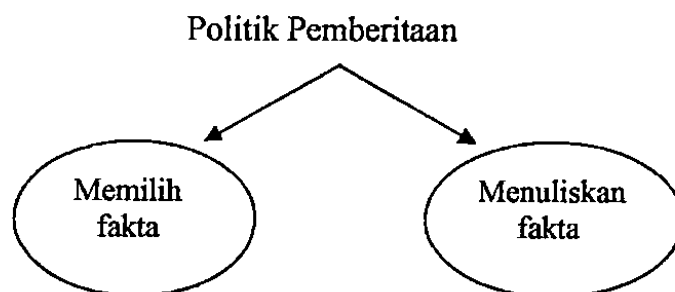
<sup>14</sup> Glen Lewis and Christina Slade, op cit, h. 12



Titik penting dalam memahami media adalah ketika media melakukan politik pemaknaan dalam suatu praktik konstruksi. Media pada dasarnya tidak mereproduksi tetapi menentukan (*to define*) realitas melalui pemakaian kata-kata terpilih.<sup>15</sup> Politik pemakaan terhadap realitas dilakukan media melalui pemilihan dan pendefinisian fakta, selain penggunaan bahasa dalam menuliskan berita.

Pemilihan fakta ini tidak saja dapat dipahami sebagai bagian teknik jurnalistik, tetapi merupakan politik pemberitaan yang dipraktikkan media. Karena dengan memilih fakta tertentu dan membuang fakta lain, realitas yang hadir adalah fakta bentukan berdasarkan kerangka konsep dan abstraksi wartawan dalam menggambarkan realitas.

Cara pemilihan dan penulisan tertentu sebuah fakta, menurut Norman Fairclough, disebut sebagai politik pemberitaan. Hasil akhirnya adalah penonjolan yang berbeda terhadap suatu fakta yang akan menggiring perhatian publik pada sisi tertentu pula.<sup>16</sup> Politik pemberitaan ini secara gambling dapat digambarkan sebagai berikut<sup>17</sup> :



<sup>15</sup> Eriyanto, *op.cit.*

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> Seriwandia H. A. & Qurayini Hasan, "Analisis Berita Pada Indonesia", Jakarta, 2002, hal. 20

Politik pemberitaan itu pada akhirnya menjadi politisasi pers. Ini tak lepas dari kebijakan redaksional yang menetapkan dan melahirkan pemihakan pada kepentingan politik, ideologi, dan nilai tertentu. Pers berkesempatan untuk memiliki kepentingan sendiri yang tidak harus mengakomodasikan konteks structural di sekelilingnya. Dengan kata lain, kecenderungan politisasi ini lahir karena semua kelompok (pers, negara, masyarakat dan pemodal) tidak selalu memiliki kepentingan yang sama<sup>18</sup>. Politisasi ini dapat mempengaruhi tingkat objektivitas dimana terkandung etika jurnalistik seperti akurasi, kejujuran, keseimbangan, dan keadilan sebagai kaidah yang baku. Pemilihan kata, penyusunan narasi (rekonstruksi), penempatan berita, jumlah foto, dan ruang yang diperuntukkan bagi berita tersebut dapat memberikan implikasi-implikasi yang lebih jauh bagi pembacanya.<sup>19</sup> Akibat lainnya adalah munculnya bias sistemik dan mobilisasi bias yang sebagian besar dipicu oleh sumber berita, pluralitas dalam organisasi media, perspektif penguasa politik dan pemilik modal, serta perspektif wartawan maupun grup penerbitan dengan berbagai kepentingan yang dimilikinya<sup>20</sup>.

Namun, media yang mempunyai ideologi, nilai, orientasi, dan sikap tertentu yang diperjuangkan dalam pemberitaannya adalah hal yang dapat diterima. Karena, pluralitas keberpihakan pada pengelompokan politik yang ada dalam masyarakat merupakan tolak ukur kinerja sebuah demokrasi. Keberpihakan media pada nilai tertentu, khususnya nilai-nilai universal, serta pembelaan

---

<sup>18</sup> Ahmad Maburri, "Dilematika Politisasi Pers Nasional", Jakarta, 2000.

<sup>19</sup> William L. Rivers dan Cleve Mathews, "Etika Media Massa dan Kecenderungan Untuk Melanggarnya", Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1994, h. 129-139.

<sup>20</sup> Hori Winerke, "Mendeteksi Bias Berita", Yogyakarta, 2000, h. 65-92.

terhadap kepentingan masyarakat secara umum, justru diharapkan selama keberpihakan itu tidak melupakan standard baku jurnalistik (*old canon of journalism*).

Keberpihakan menjadi etis jika media memberikan kesempatan yang sama, seimbang, setara kepada pihak yang terlibat dalam suatu wacana berita untuk menyampaikan pandangan dan memegang kendali pemberian pemaknaan sehingga proses pengumpulan data, fakta, serta opini sesuai dengan realitas serta menyuguhkan alternatif penafsiran bagi khalayak. Misalnya, dengan memisahkan fakta dan opini, menghindari pandangan emosional dalam peristiwa dari beberapa sisi yang berbeda (obyektif).<sup>21</sup> Dengan demikian, media tetap menjadi arena terbuka bagi terciptanya diskusi publik, tempat bagi masing-masing kelompok saling bertarung, menyajikan perspektif, dan memberikan pemaknaan terhadap suatu persoalan atau realitas.

Dengan melakukan semua kegiatan jurnalisme, media melakukan framing dalam melihat melihat realitas. Frame media merupakan proses seleksi dan penonjolan aspek tertentu dari realitas yang dilakukan media.

Mengutip pernyataan Robert M. Entman :

*" is to select some aspects of a perceived reality and make them more salient in communicating text, in such a way as to promote a particular problem definition, causal interpretation, moral evaluation, and/or treatment recommendation for the item described."*<sup>22</sup>

Dari hal tersebut, Entman merumuskan framing sebagai seleksi suatu aspek realitas dan membuatnya lebih ditekankan dalam teks komunikasi, seperti suatu

---

<sup>21</sup> Eriyanto, *op.cit.*

<sup>22</sup> Robert M. Entman, "Framing: Toward Clarification of Fractured Paradigm", *Political Communication*, Vol. 43 No.4 Autumn 1993, hal 52.

jalan untuk menawarkan masalah yang ditekankan, interpretasi kausal, evaluasi moral, dan atau perlakuan yang direkomendasikan untuk peristiwa yang digambarkan.

Ada dua konsepsi dari framing yang saling berkaitan<sup>23</sup>, yaitu :

- a. **Dimensi Psikologis.** Framing adalah upaya atau strategi yang dilakukan wartawan untuk menekankan dan membuat pesan menjadi bermakna, lebih mencolok, dan diperhatikan oleh publik. Secara psikologis, orang cenderung menyederhanakan realitas dan dunia yang kompleks itu bukan hanya agar lebih sederhana dan dapat dipahami. Daniel Kahneman dan Amos Tversky membuat serangkaian penelitian lewat studi eksperimental. Yaitu bagaimana pesan dibingkai atau dibungkus secara berbeda akan dimaknai dan dipahami secara berbeda pula oleh khalayak. Di sini, pemahaman dan pemaknaan khalayak tidak tergantung pada realitas atau fakta, tetapi tergantung pada bagaimana realitas itu disajikan : bagaimana pesan dibingkai dengan kemasan tertentu yang menyebabkan pemahaman tertentu dalam benak khalayak.
- b. **Dimensi Sosiologis.** Pada level sosiologis, lebih melihat pada bagaimana konstruksi sosial atas realitas. Frame disini dipahami sebagai proses bagaimana seseorang mengklasifikasikan, mengorganisasikan, dan menafsirkan pengalaman sosialnya untuk mengerti dirinya dan realitas di luar dirinya. Frame disini berfungsi membuat suatu realitas menjadi teridentifikasi, dipahami, dan dapat dimengerti karena sudah dilabeli dengan label tertentu.

---

<sup>23</sup> Frijanto, "Audience Framing: Konsep dan Aplikasinya dalam Jurnal Media". *Media*, 2022.

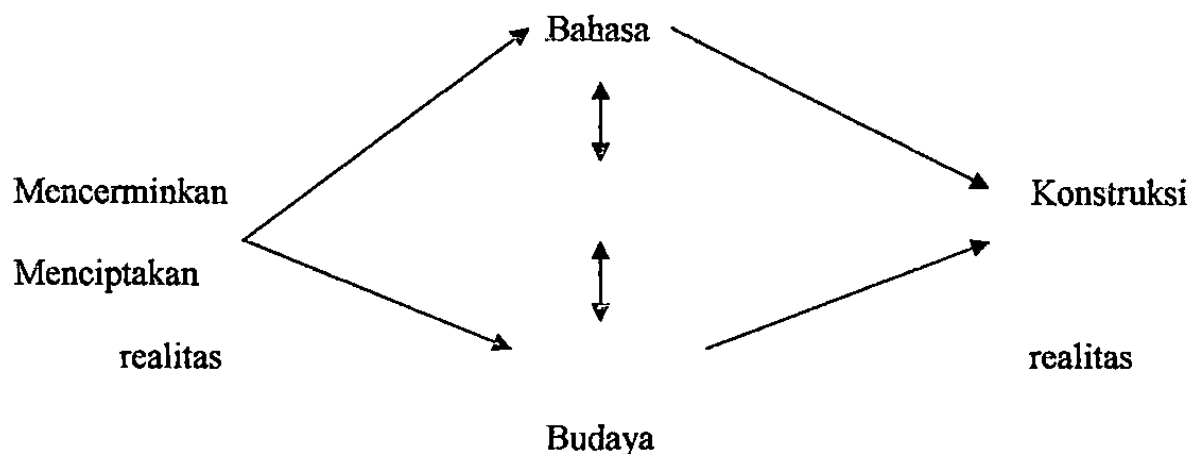
Disini tampak ada dua konsepsi yang agak berlainan mengenai framing. Di satu sisi framing dipahami sebagai struktur internal dalam alam pikiran seseorang, di sisi lain framing dipahami sebagai perangkat yang melekat dalam wacana sosial/politik. Bagi Pan dan Kosicki, framing pada dasarnya melibatkan kedua konsepsi tersebut. Dalam media, framing karenanya dipahami sebagai perangkat kognisi yang digunakan dalam informasi untuk membuat kode, menafsirkan, dan menyimpannya untuk dikomunikasikan dengan khalayak yang kesemuanya dihubungkan dengan konvensi, rutinitas, dan praktik kerja professional wartawan. Framing lalu dimaknai sebagai suatu strategi atau cara wartawan dalam mengkonstruksi dan memproses peristiwa untuk disajikan kepada khalayak.

## **F.2. Konstruksi Realitas Sosial**

Pada prinsipnya setiap upaya menceritakan sebuah peristiwa, keadaan, atau benda melalui simbol-simbol (baik verbal maupun nonverbal) merupakan usaha mengkonstruksi realitas. Penyusunan realitas (*construction of reality*) secara subyektif juga terjadi dalam pembuatan dan penulisan berita. Dari yang awalnya berbentuk data atau fakta yang acak dan terpenggal-penggal menjadi sistematis dalam bentuk realita simbolik berupa berita dan cerita. Dengan demikian, sesungguhnya berita-berita yang dikonsumsi khalayak setiap hari adalah realitas (peristiwa, keadaan, benda) yang telah dibahasakan oleh para komunikator massa.<sup>24</sup>

Apa yang disiarkan media adalah produk intelektual yang penuh dengan muatan dan kepentingan politik, ekonomi, sosial, dan budaya dari pemilik, pengelola dan pendukung media itu sendiri. Artinya, media bukan sekedar pelaku dalam proses konstruksi realitas sosial dalam sebuah arena publik, tetapi juga wadah bagi segala subyektifitas kepentingan berbagai kelompok yang ada dalam masyarakat,<sup>25</sup> termasuk di dalamnya ideologi profesi yang secara riil dipraktikkan para pekerja media.

Elemen utama yang dipakai dalam mengkonstruksi realitas adalah bahasa. Bahasa yang digunakan bisa berbentuk verbal seperti kata-kata lisan dan tulisan maupun nonverbal seperti gambar, foto, gerak-gerik, grafik, angka, tabel, dan lain-lain. Pemilihan kata, struktur bahasa, cara penyajian, serta penyampaian secara keseluruhan sebuah teks dapat menentukan bentuk konstruksi realitas yang sekaligus akan menghasilkan makna tertentu darinya, termasuk pemilihan kata-kata tertentu yang secara efektif mampu memanipulasi konteks. Kuatnya hubungan antara bahasa dan realitas, dapat dilihat dari gambar berikut.<sup>26</sup>



<sup>25</sup> Dedy, N Hidayat, "Memantau Media, Memantau Arena Publik" Majalah Pantau, Edisi 05 /

Dengan analisis struktur logika dari bahasa yang dikembangkan dan penggunaan kata-kata dalam mengkonstruksi realitas, dapat ditebak makna dan citra yang hendak dikembangkan media. Sebab, pilihan kata tertentu dalam menuliskan realitas tidak sekedar berurusan dengan teknis jurnalistik, tetapi juga sebagai politik bahasa.<sup>27</sup>

Perihal bahasa dalam menciptakan realitas tertentu, menurut Kenneth Burke, kata-kata tertentu tidak hanya memfokuskan perhatian khalayak pada masalah tertentu, tetapi juga membatasi persepsi khalayak dan mengarahkan pada cara berpikir serta keyakinan tertentu.<sup>28</sup> Dengan kata lain, kata-kata yang dipakai dapat membatasi seseorang untuk melihat perspektif lain, menyediakan aspek tertentu dari suatu peristiwa, dan mengarahkan khalayak untuk memahami suatu peristiwa.

Ada beberapa praktik pemakaian bahasa yang dapat ditelaah.<sup>29</sup> *Pertama*, penghalusan kata atau makna (*eufemisme*). Melalui pemakaian kata-kata ini realitas buruk bisa kembali menjadi halus, sehingga khalayak tidak melihat kenyataan yang sebenarnya. *Kedua*, pengasaran bahasa (*disfemisme*) yang mengakibatkan realitas menjadi kasar. Penggunaan kata ini biasanya dipakai untuk menyebut tindakan petani, buruh, dan rakyat bawah sebagai pencaplokan, penyerobotan, dan penjarahan. Bahasa ini akan menggambarkan bahwa mereka melakukan hal yang illegal dan anarkhis. *Ketiga*, penggunaan labelisasi (*labelling*), merupakan pemakaian kata-kata ofensif pada individu atau kelompok

---

<sup>27</sup> Eriyanto, "Politik Pemberitaan", Majalah *Pantau*, edisi 09/Tahun 2000, h.80-89.

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> Daddy Mukwan "Teori Labelisasi dan Media Massa", Majalah *Pantau*, Edisi 06/ Oktober

dengan segala aktivitasnya dengan tujuan mensifati atau menjuluki obyek. Pada akhirnya, labelisasi ini dapat mempengaruhi pikiran khalayak dan membentuk citra tertentu.

Konsep mengenai konstruksionis diperkenalkan oleh sosilog interpretatif, Peter L. Berger. Menurut Berger, realitas kehidupan sehari-hari memiliki dimensi-dimensi subjektif dan objektif. Manusia merupakan instrumen dalam menciptakan realitas sosial yang objektif melalui proses eksternalisasi, sebagaimana ia mempengaruhinya melalui proses internalisasi (yang mencerminkan realitas subjektif). Dalam mode yang dialektis, di mana terdapat tesis, antitesis, dan sintesis, Berger melihat masyarakat sebagai produk manusia dan manusia sebagai produk masyarakat. Baik manusia dan masyarakat saling berdialektika di antara keduanya. Masyarakat tidak pernah sebagai suatu produk akhir, tetapi tetap sebagai proses yang sedang terbentuk<sup>30</sup>. Proses dialektis tersebut mempunyai tiga tahapan peristiwa. *Pertama*, eksternalisasi, yaitu usaha pencurahan atau ekspresi diri manusia ke dalam dunia, baik dalam kegiatan mental maupun fisik. Ini sudah menjadi sifat dasar manusia, ia akan selalu mencurahkan diri ke tempat di mana ia berada. Manusia tidak dapat kita mengerti sebagai ketertutupan yang lepas dari dunia luarnya<sup>31</sup>. Manusia berusaha menangkap dirinya, dalam proses inilah manusia menemukan dirinya sendiri dalam suatu dunia. *Kedua*, objektifitas, yaitu hasil yang telah dicapai, baik mental maupun fisik dari kegiatan eksternalisasi manusia tersebut. Hasil itu menghasilkan realitas objektif yang bisa jadi akan menghadapi si penghasil itu sendiri sebagai suatu faktisasi yang berada di luar dan

---

<sup>30</sup> Margaret M. Poloma, "Sosiologi Kontemporer", Jakarta, 1984, h.308-310.

<sup>31</sup> DR. Pius Mursanto, "Peter Berger: Realitas Sosial Agama", Driyokoro (ed.), Diskursus



berlainan dari manusia yang menghasilkannya. Lewat proses objektifikasi ini, masyarakat menjadi suatu realitas *sui generis*. Hasil dari eksternalisasi itu misalnya, manusia menciptakan alat demi kemudahan hidupnya, atau kebudayaan non materiil dalam bentuk bahasa. Baik alat tadi maupun bahasa adalah kegiatan eksternalisasi manusia ketika berhadapan dengan dunia, ia adalah hasil dari kegiatan manusia. Setelah dihasilkan, baik benda atau bahasa sebagai produk eksternalisasi tersebut menjadi realitas yang objektif. Bahkan ia dapat menghadapi manusia sebagai penghasil dari produk kebudayaan. Misalnya ketika manusia menciptakan bahasa, maka alat itu menjadi realitas yang objektif, ia menjadi dirinya sendiri, bahkan dapat memaksakan logikanya sendiri kepada yang menghasilkannya. Bahasa misalnya, yang merupakan hasil kebudayaan non-materiil. Cara berpikir manusia akhirnya ditentukan oleh bahasa yang dihasilkannya. Kebudayaan yang telah berstatus sebagai realitas objektif, ada di luar kesadaran manusia. Realitas objektif itu berbeda dengan kenyataan subjektif perorangan. Ia menjadi kenyataan empiris yang bisa dialami oleh setiap orang.

*Ketiga*, internalisasi. Proses internalisasi lebih merupakan penyerapan kembali dunia objektif ke dalam kesadaran sedemikian rupa sehingga subjektif individu dipengaruhi oleh struktur dunia sosial. Berbagai macam unsur dari dunia yang telah terobjektifkan tersebut akan ditangkap sebagai gejala realitas di luar kesadarannya, sekaligus sebagai gejala internal bagi kesadaran. Melalui internalisasi, manusia menjadi hasil dari masyarakat.

Dalam perspektif konstruksi sosial yang dibangun oleh Berger, kenyataan bersifat plural, dinamis, dan dialektis. Kenyataan itu bersifat plural karena adanya

relativitas sosial dari apa yang disebut pengetahuan dan kenyataan. Setiap orang bisa mempunyai konstruksi yang berbeda-beda atau suatu realitas<sup>32</sup>. Setiap orang yang mempunyai pengalaman, preferensi, pendidikan tertentu, dan lingkungan pergaulan atau sosial tertentu akan menafsirkan realitas sosial itu dengan konstruksinya masing-masing. Konstruksi yang mereka buat itu dilengkapi dengan legitimasi tertentu, sumber kebenaran tertentu, bahwa apa yang mereka katakan dan percayai itu adalah benar adanya, dan punya dasar yang kuat. Selain plural, konstruksi sosial itu juga bersifat dinamis. Setiap individu mempunyai latar belakang sejarah, pengetahuan, dan lingkungan yang berbeda-beda, yang bisa jadi menghasilkan penafsiran yang berbeda pula ketika melihat dan berhadapan dengan objek. Sebaliknya, realitas itu juga mempunyai dimensi objektif-sesuatu yang dialami, bersifat eksternal, berada di luar atau dalam istilah Berger, tidak dapat kita tiadakan dengan angan-angan.

Pandangan Berger beranjak antara strukturalisme dan fenomenologi. Ia juga mengatasi antara pandangan fakta sosial dan pandangan definisi sosial. Dalam pandangan fakta sosial, seperti dalam Durkheim, realitas dilihat sebagai sesuatu yang eksternal, objektif, karena relatif bersifat tetap dan membentuk kehidupan individu maupun sosial. Sementara dalam perspektif definisi sosial, dalam aliran Weberian, realitas dilihat sebagai sesuatu yang internal dan subjektif. Ia dilihat sebagai kenyataan subjektif yang bergerak mengikuti dinamika makna subjektif individual. Dalam pandangan Berger, kedua pandangan tersebut sama-sama benarnya kalau diajukan secara bersama-sama. Masing-masing dari mereka

---

<sup>32</sup> M. Nisih Azca, "Hegemoni Tataru?" Yogyakarta: LKis, 1994, h. 16-17.

memaksudkan fondasi subjektif dan faktisasi objektif dari fenomena kemasyarakatan, yang dengan begitu menunjuk ke arah hubungan dialektis dari subjektivitas dengan objek-objeknya. Mengikuti perspektif konstruksi sosial berarti melihat kenyataan sosial ini sebagai sesuatu yang berada dalam proses dialektika sosial, yaitu sebagai faktisasi objektif dan sekaligus realitas subjektif; membentuk dan dibentuk masyarakat, dan begitu seterusnya<sup>33</sup>.

Wartawan bisa jadi mempunyai pandangan dan konsepsi yang berbeda ketika melihat suatu peristiwa, dan itu dapat dilihat dari bagaimana mereka mengkonstruksi peristiwa itu, yang diwujudkan dalam teks berita. Berita dalam pandangan konstruksi sosial, bukan merupakan peristiwa atau fakta dalam arti yang riil. Di sini realitas bukan dioper begitu saja sebagai berita. Ia adalah produk interaksi antara wartawan dengan fakta. Dalam proses internalisasi, wartawan dilanda oleh realitas. Realitas diamati oleh wartawan dan diserap dalam kesadaran wartawan. Dalam proses eksternalisasi, wartawan menceburkan dirinya untuk memaknai realitas. Konsepsi tentang fakta diekspresikan untuk melihat realitas. Hasil dari berita adalah produk dari proses interaksi dan dialektika tersebut.

Demikian halnya ketika seseorang melakukan wawancara. Ketika seseorang mewawancarai narasumber, di sana terjadi interaksi antara wartawan dengan narasumber. Realitas yang terbentuk dari wawancara tersebut adalah produk interaksi antara keduanya. Realitas hasil wawancara bukan hasil operan antara apa yang dikatakan oleh narasumber dan ditulis sedemikian rupa ke dalam berita. Di sana juga ada proses eksternalisasi: pertanyaan yang diajukan dan juga

sudut penggambaran yang dibuat oleh pewawancara yang membatasi pandangan narasumber. Belum termasuk bagaimana hubungan dari kedekatan antara wartawan dengan narasumber. Proses dialektis di antara keduanya yang menghasilkan wawancara yang kita baca di surat kabar atau kita lihat di televisi.

Shoemaker dan Reese mengatakan bahwa objektivitas berita adalah ideologi dari jurnalis modern.<sup>34</sup> Objektivitas adalah konstruksi untuk memberi kesadaran pada khalayak bahwa pekerjaan wartawan adalah menyampaikan kebenaran dan untuk direspon oleh pembaca. Objektivitas memberikan legitimasi kepada media untuk diinformasikan kepada pembaca, bahwa informasi yang disampaikan wartawan adalah benar-benar terjadi dan bukan opini.

Untuk mengetahui berita yang objektif, hal ini dapat dilakukan oleh wartawan dengan memisahkan antara fakta dan opini. Upaya demikian dapat dijabarkan melalui beberapa prosedur. Pertama, dapat dilakukan melalui reportase, pengamatan, dan wawancara. Kedua, mengkonstruksi pendapat antara satu sumber dengan sumber lain, atau sering disebut sebagai *Cover Both Side* (liputan dua sisi). Hal ini untuk menekankan bahwa wartawan tidak berpihak pada salah satu sisi saja.<sup>35</sup> Dengan demikian media cetak menampilkan sebuah cara memandang suatu realitas, dan pada akhirnya berpengaruh kuat terhadap pembentukan makna.

---

<sup>34</sup> Shoemaker, Reese dalam Eriyanto (2002), *"Analisis Framing, Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media"*, LkiS Yogyakarta, Oktober 2002, hal 122-124.

<sup>35</sup> Bennet, W Lance (1996) *"An Introduction to Journalism Norm and Representation of Politics"*

Pamela J. Shoemaker dan Stephen D. Reese meringkas beberapa faktor yang mempengaruhi kebijakan redaksi dalam memproduksi berita<sup>36</sup> :

#### 1. Faktor individual

Faktor ini berhubungan dengan latar belakang profesionalisme dari pengelola media. Latar belakang kehidupan wartawan seperti jenis kelamin, agama, tingkat pendidikan, agama, tingkat pendidikan, dan budaya akan mempengaruhi pola pemberitaan. Media dalam menurunkan sebuah berita selalu dipengaruhi oleh aspek-aspek personal wartawan dan pengelola media. Dampak dari hal tersebut media akan memutuskan mana yang akan dimuat dan mana yang tidak akan dimuat untuk dijadikan sebuah berita.

#### 2. Rutinitas media

Ada banyak faktor yang menentukan kenapa peristiwa tertentu dihitung sebagai berita kemudian peristiwa lain tidak dihitung sebagai berita, dan kenapa peristiwa tertentu ditonjolkan sedangkan ada yang tidak ditonjolkan. Jika media menampilkan aspek tertentu bukan berarti media tersebut memerankan peran negatif dalam proses pembentukan media, namun untuk mengelabui publik. Hal demikian bisa saja terjadi, namun semua proses seleksi terjadi karena rutinitas kerja keredaksionalan yang dianggap sebagai suatu bentuk rutinitas organisasi media. Kemudian disinilah seorang redaktur memegang sebuah kendali pemberitaan,

---

<sup>36</sup> Agus Sudibyo, "Politik Media dan Berperannya Warga" LKIS, 2001, hal 7-12

redaktur memiliki otoritas penuh atas pemilihan suatu peristiwa yang layak atau tidak layak untuk dijadikan sebuah berita.

### 3. Level organisasi

Sebuah pembentukan media dipengaruhi oleh institusi media. Wartawan, editor, layouter, dan fotografer adalah sebagian kecil dari institusi media. Pengelola media dan wartawan bukanlah orang tunggal yang menentukan sebuah berita, lebih dari itu, ada aspek lain yang mempengaruhi seperti bagian pemasaran, pengiklan, dan pemodal. Beberapa hal tersebut sangat mempengaruhi sebuah peristiwa untuk dijadikan berita. Kepentingan ekonomi seperti pemilik modal, pengiklan, dan pemasaran selalu mempertimbangkan sebuah peristiwa yang dapat menaikkan angka penjualan atau oplah media.

### 4. Level ekstramedia

Pada level ini, kenyataannya sebuah media hanya bagian dari sistem yang besar, kompleks yang sedikit banyaknya menentukan kehadiran suatu berita. Ada beberapa faktor diluar lingkungan media yang mempengaruhi pemberitaan :

#### a. Sumber berita

Yang dipandang disini bukan sebagai pihak yang netral tetapi juga mempunyai kepentingan untuk mempengaruhi media dengan berbagai alasan.

Misal : menenangkan opini publik, memberi citra tertentu kepada

khlayak agar khlayak ikut mendukung argumentasinya

b. Sumber penghasilan media

Pada tahap ini sebuah institusi media dalam menentukan kelanggengannya, media membutuhkan dana. Kue iklan dalam suatu media dijadikan sebagai alat pernafasan suatu institusi media agar dapat *survive* atau bertahan. Akibat lebih jauh suatu pemberitaan akan tunduk dan patuh terhadap pengiklan, kemudian yang terjadi adalah subjektifitas media akan terancam. Bagaimanapun media tidak memiliki opsi lain apabila keburukan dari salah satu pelanggan iklan dijadikan suatu kasus atau bahan pemberitaan ke publik, maka pengiklan tidak akan segan-segan untuk *mengembargo* media tersebut dengan cara berhenti langganan atau menjadi pelanggan iklan tetap.

c. Pihak eksternal, seperti pemerintah dan lingkungan bisnis.

d. Level ideologi

Dalam konteks ini diartikan sebagai kerangka berpikir atau kerangka referensi yang dipakai oleh setiap individu dalam menafsirkan realitas dan bagaimana individu tersebut menghadapinya. Ideologi pada tataran ini adalah suatu konsep yang abstrak, yang berhubungan dengan konsepsi individu dalam menafsirkan suatu realitas. Ideologi yang abstrak diartikan sebagai siapa yang berkuasa dan siapa yang menentukan bagaimana media tersebut akan dinikmati oleh publik

## **G. METODE PENELITIAN**

### **1. Teknik Pengumpulan Data**

#### **a. Sumber Primer**

Dalam pengumpulan data, harian Bangka Pos dan Kompas merupakan sumber data utama. Teknik yang dilakukan dengan mempelajari dokumen-dokumen dan catatan di surat kabar harian Bangka Pos dan Kompas pada edisi Oktober 2003-Desember 2003 mengenai berita yang megupas konflik antara penambang timah dengan pemerintah mengenai kerusakan lingkungan hidup akibat adanya penambangan timah di Pulau Bangka.

#### **b. Sumber Sekunder**

Untuk kelengkapan data yang lebih lengkap, dilakukan kajian pustaka, yaitu mengolah data yang diperoleh dari literatur : buku, internet, koran dan tulisan-tulisan yang berhubungan dengan topik penulisan.

#### **c. Alasan Pemilihan Media**

Berikut ini akan disajikan perbandingan rubrikasi, karakteristik surat kabar, serta latar belakang ideologi dari kedua media tersebut.

Jika diskemakan adalah sebagai berikut :



Tabel 1.1

## Karakteristik Harian Kompas dan Harian Bangka Pos

Kategori	Harian Kompas	Harian Bangka Pos
Waktu Terbit	Setiap hari	Setiap hari
Jumlah Halaman	Edisi 36 halaman, edisi 52, edisi 56.	Edisi 16 halaman
Dominasi Peredaran	Dominasi Jakarta	Dominasi Bangka
Jumlah Rubrik	38 rubrik	21 rubrik
Ilustrasi / Foto	Hitam putih dan warna	Hitam putih dan warna
Latar Belakang	Dulu milik partai katolik	PT Indopersada Primamedia

Sumber : [www.kompas.com](http://www.kompas.com) , [www.bangkapos.com](http://www.bangkapos.com), Surat kabar harian Kompas dan Bangka Pos

Dari sudut rubrikasinya, kedua media surat kabar tersebut mempunyai perbedaan yang signifikan. Harian Kompas memiliki jumlah rubrik yang lebih banyak, yaitu sebanyak 51 rubrik. Sedangkan Harian Bangka Pos hanya mempunyai jumlah rubrik sebanyak 21 rubrik. Ini dikarenakan Harian Kompas mempunyai jumlah halaman lebih banyak daripada Harian Bangka Pos dalam terbitan setiap harinya.

Ditinjau dari wilayah peredaran, harian Kompas kebanyakan beredar di Jakarta atau pun Jabotabek. Hal ini disebabkan karena Harian Kompas sebagai surat kabar nasional yang berada di Jakarta dan sekitarnya mempunyai peredaran yang luas di daerah ibukota sebagai pusatnya. Sedangkan untuk Harian Bangka

Pos, peredarannya dipusatkan untuk daerah Bangka, karena Harian Bangka Pos merupakan koran lokal.

Latar belakang ideologis kedua media adalah kedua media mempunyai latar belakang ideologis yang cukup berbeda. Harian Kompas dulunya berakar pada Partai Katolik yang kemudian melebur dalam PDI, kemudian menjadi Koran yang berorientasi moderat dan bisnis secara professional.

Sedangkan Harian Bangka Pos merupakan koran lokal dari Propinsi Bangka Belitung, dibawah jaringan PT Indopersda Primamedia dari kelompok Kompas Gramedia. Berita yang disajikan pun lebih memusatkan pada berita seputar Bangka. Sahamnya hampir 100 persen dimiliki oleh Indopersda. Kemudian Bangka Pos mendirikan PT Bangka Media Grafika sebagai anak perusahaan PT Indopersda Primamedia.

## 2. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah analisis framing yaitu analisis yang mencoba mencakup bentuk pemberitaan dan bagaimana memperlihatkan suatu orientasi sebuah media dengan cara tertentu dalam mengkonstruksi fakta, yaitu dengan menggunakan model William A. Gamson. Frame menurut Gamson menunjuk pada skema pemahaman individu sehingga seseorang dapat menempatkan, mempersepsi, mengidentifikasi, dan memberi label peristiwa dalam pemahaman tertentu<sup>37</sup>.

---

<sup>37</sup> Eriyanto, "Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media", LKiS, Yogyakarta, Hal 218.

Sebuah frame mempunyai struktural internal. Dalam formulasi yang dibuat oleh Gamson dan Modigliani, frame dipandang sebagai cara bercerita (*Story Line*) atau gugusan ide-ide yang tersusun sedemikian rupa dan menghadirkan konstruksi makna dari peristiwa yang berkaitan dengan suatu wacana. Gamson melihat wacana media (khususnya berita) terdiri atas sejumlah kemasan (*package*) melalui mana konstruksi atas suatu peristiwa dibentuk. Kemasan itu merupakan skema atau struktur pemahaman yang dipakai oleh seseorang ketika mengkonstruksi pesan-pesan yang dia sampaikan, dan menafsirkan pesan yang dia terima<sup>38</sup>.

Framing adalah pendekatan untuk mengetahui bagaimana perspektif atau cara pandang yang digunakan oleh media ketika menseleksi isu dan menulis berita. Cara pandang atau perspektif itu pada akhirnya menentukan fakta apa yang diambil, bagian mana yang ditonjolkan dan dihilangkan, dan hendak dibawa kemana berita tersebut. Gamson dan Modigliani menyebut cara pandang itu sebagai kemasan (*package*). Kemasan (*package*) adalah rangkaian ide-ide yang menunjukkan isu apa yang dibicarakan dan peristiwa mana yang relevan.

Kemasan (*package*) tersebut, dibayangkan sebagai wadah atau struktur data yang mengorganisir sejumlah informasi yang menunjukkan posisi atau kecenderungan politik, dan yang membantu komunikator untuk menjelaskan muatan-muatan di balik suatu isu atau peristiwa. Keberadaan dari suatu *package* terlihat dari adanya gagasan sentral yang kemudian didukung oleh perangkat-perangkat wacana seperti kata, kalimat, pemakaian gambar atau grafik tertentu,

---

<sup>38</sup> Ericson dan Smith, Ericson, "Kontak dan Hubungan Politik Media," *Jurnal Komunikasi*, Mei 1991, hal. 1-10.

proposisi dan sebagainya. Semua elemen dan struktur wacana tersebut mengarah pada ide tertentu dan mendukung ide sentral dari suatu berita<sup>39</sup>.

Perangkat framing yang dikemukakan oleh Gamson dan Modigliani dapat digambarkan sebagai berikut<sup>40</sup> :

<i>Frame</i> <i>Central organizing idea for making sense of relevant events, suggesting what is at issues</i>	
<i>Framing Device</i> (Perangkat Framing)	<i>Reasoning Devices</i> (Perangkat penalaran)
<i>Methapors</i> Perumpamaan atau pengandaian	<i>Roots</i> Analisis kausal atau sebab akibat
<i>Catchphrases</i> Frase yang menarik, kontras, menonjol dalam suatu wacana. Ini umumnya berupa jargon atau slogan.	<i>Appeals to principle</i> Premis dasar, klaim-klaim moral
<i>Exemplar</i> Mengaitkan bingkai dengan contoh, uraian (bisa teori, perbandingan) yang memperjelas bingkai	<i>Consequences</i> Efek atau konsekuensi yang didapat dari bingkai
<i>Depiction</i> Penggambaran atau pelukisan suatu isu yang bersifat konotatif. <i>Depiction</i> ini umumnya berupa kosakata, leksikon untuk melabeli sesuatu.	

<sup>39</sup> Eriyanto, "Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media", LKiS, Yogyakarta, 2002, Hal 225.

<sup>40</sup> Eriyanto, "Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media", LKiS, Yogyakarta, 2002, Hal 225.

<p><i>Visual Images</i></p> <p>Gambar, grafik, citra yang mendukung bingkai secara keseluruhan. Bisa berupa foto, kartun, ataupun grafik untuk menekankan dan mendukung pesan yang ingin disampaikan.</p>	
---	--

Dalam pandangan Gamson, framing dipahami sebagai seperangkat gagasan atau ide sentral ketika seseorang atau media memahami dan memaknai suatu isu. Ide sentral ini, akan didukung oleh perangkat wacana lain sehingga antara satu bagian wacana dengan bagian lain saling kohesif-saling mendukung.

Ada dua perangkat bagaimana ide sentral ini diterjemahkan dalam teks berita<sup>41</sup>. Pertama, *framing device* (perangkat framing). Perangkat ini berhubungan dan berkaitan langsung dengan ide sentral atau bingkai yang ditekankan dalam teks berita. Perangkat framing ini ditandai dengan pemakaian kata, kalimat, grafik/gambar, dan metafora tertentu. Perangkat framing terdiri dari 5 strategi yaitu<sup>42</sup> :

*Pertama, Metaphors*. Secara literal metaphors dipahami sebagai cara memindah makna dengan merelasikan dua fakta melalui analogi, atau memakai kiasan dengan menggunakan kata-kata seperti, ibarat, bak, sebagai, umpama, laksana. Henry Guntur Tarigan menilai *metaphora* sebagai jenis gaya bahasa perbandingan yang paling singkat, padat, tersusun rapih. Di dalamnya terlihat dua gagasan, yang satu adalah suatu kenyataan, sesuatu yang dipikirkan, yang menjadi obyek ;

<sup>41</sup> Eriyanto, "Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media", LKiS, Yogyakarta, 2002, Hal 226.

<sup>42</sup> Drs. Alex Schuy M. Si "Analisis Teks Media" PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2001

dan yang satu lagi merupakan pembandingan terhadap kenyataan tadi ; dan kita menggantikan yang belakangan itu menjadi terdahulu tadi. John Fiske menilai *metaphora* sebagai *common sense*, pengalaman hidup keseharian yang ditaken for granted masyarakat. *Common sense* terlihat alamiah (kenyataannya diproduksi secara arbitrer) dan perlahan-lahan menjadi kekuasaan ideologis kelas dominan dalam memperluas dan mempertahankan ide untuk seluruh kelas. *Metaphora* berperan ganda ; pertama sebagai perangkat diskursif dan ekspresi pirantimental ; kedua, berasosiasi dengan asumsi atau penilaian, serta memaksa teks membuat *sense* tertentu.

*Kedua, Exemplaar.* Mengemas fakta tertentu secara mendalam agar satu sisi memiliki bobot makna lebih untuk dijadikan rujukan/pelajaran. Posisinya menjadi pelengkap bingkai inti dalam kesatuan berita untuk membenarkan perspektif.

*Ketiga, Cathphrases.* Istilah, bentukan kata, atau frase khas cerminan fakta yang merujuk pemikiran atau semangat tertentu. Dalam teks berita, *cathphrases* mewujudkan dalam bentuk jargon, slogan, atau semboyan.

*Keempat, Depiction.* Penggambaran fakta dengan memakai kata, istilah, kalimat konotatif agar khalayak terarah ke citra tertentu. Asumsinya, pemakaian kata khususnya diniatkan untuk membangkitkan prasangka, menyesatkan pikiran dan tindakan serta efektif sebagai bentuk aksi politik. *Depiction* dapat berbentuk stigmatisasi, eufemisme, serta akronimisasi.

*Kelima, Visual Images.* Pemakaian foto, diagram, grafis, tabel, kartun, dan sejenisnya untuk mengekspresikan kesan, misalnya perhatian atau penolakan, dibesar-besarkan, dikecil-kecilkan, ditebalkan/dimiringkan, serta pemakaian

warna. *Visual Images* bersifat sangat natural, sangat mewakili realitas yang membuat erat muatan ideologi pesan.

Kemudian perangkat yang kedua adalah *reasoning devices* (perangkat penalaran). Perangkat penalaran ini berhubungan dengan kohesi dan koherensi dari teks tersebut yang merujuk pada gagasan tertentu. Sebuah gagasan juga ditandai oleh dasar pembenar tertentu, alasan tertentu, penalaran dan sebagainya. Lewat aspek penalaran tersebut, khalayak akan menerima pesan itu sehingga tampak sebagai kebenaran, alamiah, dan wajar.

Ada 2 strategi dalam perangkat penalaran. *Pertama, Roots*. Pembenaran isu dengan menghubungkan suatu obyek/lebih yang dianggap menjadi sebab timbulnya/terjadinya hal yang lain. Tujuannya membenarkan penyimpulan fakta berdasarkan hubungan sebab-akibat yang digambarkan/dibeberkan. *Kedua, Appeal to Principle*. Pemikiran, prinsip, klaim moral, sebagai argumentasi pembenar membangun berita berupa pepatah, cerita rakyat, mitos, doktrin, ajaran, dan lain-lain. *Appeal to Principle* yang apriori, dogmatis, simplistik, dan monokausal (nonlogis) bertujuan membuat khalayak tidak berdaya menyanggah argumentasi. Fokusnya, memanipulasi emosi agar mengarah ke sifat, waktu, tempat, dan sebagainya.